

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA
WATUMERAK KECAMATAN DORENG KABUPATEN SIKKA**



SKRIPSI

Oleh

AMBROSIUS YOLIANTO

4513021039

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program

Studi Ilmu Administrasi Negara

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Tersebut
di Bawah ini :

Judul Penelitian : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA WATUMERAK
KECAMATAN DORENG KABUPATEN SIKKA**

Nama : AMBROSIUS YOLIANTO

No Stambuk : 4513021039

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah di periksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian skripsi pada
jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Bosowa Makassar

Makassar, 21 Juli 2017

Menyetujui :

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Husain Hamka, M.S

Pembimbing II

Drs. Natsir Tompo, M.Si

Mengetahui:

Dekan Fisipol



Prof. Dr. H. Hamksono, S.Ip., M.A

Ketua Jurusan Administrasi Negara

Drs. Natsir Tompo, M.Si

HALAMAN PENERIMAAN

Hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa
Watumerak Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka

Nama : Ambrosius Yolianto

Nomor Stambuk : 4513021039

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

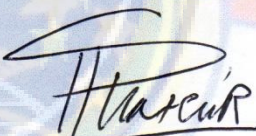
Telah diterima Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ilmu sosial (S.Sos) pada Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar

Panitia Ujian :

Ketua


Ari Wicaksono, S.Ip., M.A
Dekan Fisip
Universitas Bosowa Makassar

Sekretaris


Drs. Natsir Tompo, M.Si
Ketua Jurusan Administrasi Negara
Universitas Bosowa Makassar

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. H. Husain Hamka, M.S
2. Drs. Natsir Tompo, M.Si
3. Dr. Nurkaidah, MM
4. Ade Ferry Afrisal, SH. M.Sc


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

ABSTRAK

AMBROSIUS YOLIANTO. NIM 45 13 021 039. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Watumerak Kecamatan Doreng, dibawa bimbingan Prof. Husain Hamka, M.S. dan Drs. Natsir Tompo M.SI.

Penelitian ini dilakukan di Desa Watumerak Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka, dengan tujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Watumerak. (2) Faktor Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam di Desa Watumerak.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi tahapan-tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya peran pemerintah desa sebagai dinamisator, motivator dan inovator belum maksimal. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dimana tingkat pendidikan. Tingkat ekonomi dan pendekatan dari kepala desa kepada masyarakat belum begitu sempurna.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan berkatnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA WATUMERAK KECAMATAN DORENG KABUPATEN SIKKA”**

Penulis menyadari, dalam penyusunan karya ilmiah ini banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan bantuan berupa saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penulisan ke depan, sehingga apa yang diharapkan dari suatu karya tulis, yaitu dapat memberi manfaat berupa informasi dan pengetahuan dapat tercapai.

Tak lupa kata yang lebih pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Prof.Dr.H.Husain Hamka, M.S, sebagai pembimbing I dan, kepada Bapak Drs.M.Natsir Tompo,M.SI sebagai pembimbing II atas segala bantuan dan kebijaksanaanya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini

Dalam proses penyusunan tentunya melibatkan banyak pihak, untuk itu patut saya berterima kasih kepada :

1. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Bosowa Makasaar
2. Seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar

3. Semua sahabat dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk memberi motivasi dan sumbangsih berupa pikiran, moril maupun materil.
4. Kedua orang tua penulis yang telah membesarkan dan senantiasa mendukung, mendoakan serta berkorban banyak dalam memberikan bantuan baik moral maupun materi sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, serta adik adik tercinta Emerensiana Dapriska, Imakulata Dewi Marlina, Maria Nova Susanti Kety dan Fransesko Lordeson yang selalu menghibur selama dalam pengerjaan skripsi berlangsung.
5. Teman teman angkatan 2013, terima kasih atas motivasinya serta hubungan kekeluargaan yang di bangun diantara kita semua selama ini. Persaudaraan dan kekeluargaan yang kita bangun sekarang tidak akan lekang oleh waktu.

Demikianlah saya tuturkan, kalau ada kata kata yang salah mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu hanyalah milik yang Maha Kuasa.

Makassar, JULI 2017

AMBROSIUS YOLIANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Lata Belakang.....	1
B. Batasan Dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori	8
a. Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	8
b. Bentuk Partisipasi	10
c. Konsep Partisipasi masyarakat.....	12
d. Pengertian Pembangunan	14
e. Tujuan Pembangunan.....	16
f. Pengertian Desa.....	17
g. Pengertian Peranan	18
h. Pengertian Kepemimpinan dan Motivasi	19
B. Kerangka Konseptual	24

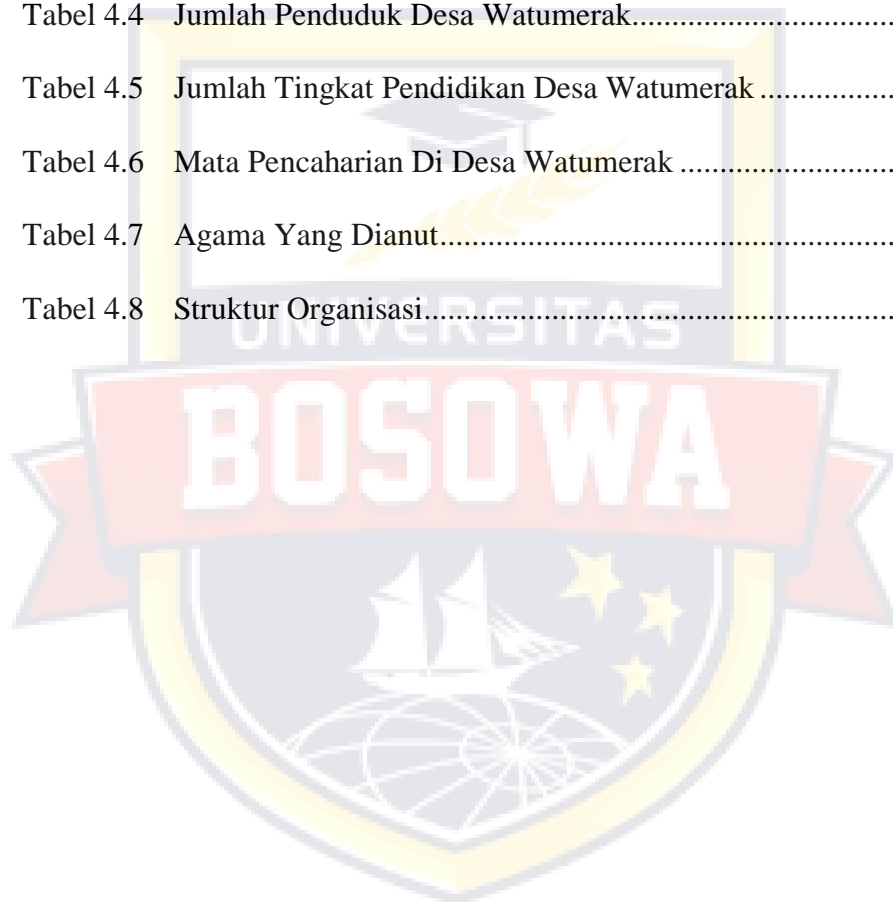
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Tempat Dan Waktu Penelitian	27
B. Type Dan Dasar Penelitian	27
C. Sumber Data	28
D. Informan Penelitian.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	33
A. Deskripsi Data	33
a. Keadaan Geografi.....	33
b. Sarana Dan Prasarana.....	35
c. Potensi Sumber Daya Manusia.....	37
d. Struktur Organisasi.....	41
e. Potensi Kelembagaan.....	42
B. Pembahasan.....	44
a. Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa.....	44
1. Peran Pemerintah Sebagai Motivator.....	46
2. Peran Pemerintah Sebagai Inovator.....	50
3. Peran pemerintah Desa Sebagai Dinamisator.....	52
b. Faktor Faktor yang mempengaruhi pembangunan.....	54
1. Pendidikan.....	55
2. Tingkat ekonomi.....	57
3. Pendekatan kepada masyarakat.....	60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1.	Tabel 4.1	Keadaan Sarana Dan Prasarana Di Desa Watumerak.....	35
2.	Tabel 4.2	Keadaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Darat.....	36
3.	Tabel 4.3	Keadaan Sarana Dan Prasarana Olahraga.....	36
4.	Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Desa Watumerak.....	37
5.	Tabel 4.5	Jumlah Tingkat Pendidikan Desa Watumerak.....	39
6.	Tabel 4.6	Mata Pencaharian Di Desa Watumerak.....	40
7.	Tabel 4.7	Agama Yang Dianut.....	41
8.	Tabel 4.8	Struktur Organisasi.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan masyarakat desa merupakan gerakan pembangunan yang didasarkan atas peran serta dan swadaya gotong royong masyarakat. Atas dasar tersebut maka kesadaran, peran serta dan swadaya masyarakat perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan dirasakan sebagai suatu kewajiban bersama (Umboh, 2004). Dengan partisipasi dan peran serta bukan berarti masyarakat itu hanya berfungsi untuk memberikan dukungan dan keikutsertaan dalam proses pembangunan, tetapi juga menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Dengan demikian akan tercipta *sense of belonging* dan *sense of responsibility* dalam proses pembangunan menuju tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah

untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan.

Menurut Raharjo (2006) suatu masyarakat dikatakan belum sejahtera jika suatu kondisi seseorang atau kelompok masyarakat masih mengalami berbagai kekurangan baik secara material maupun spiritual menuju kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat merupakan objek dan sekaligus sebagai subjek, serta menjadi sasaran dari pembangunan, sehingga dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat dominan, namun pemerintah demikian dalam praktiknya pemerintahlah yang paling dominan, sebagai unsur pelaksana utama dalam pembangunan tersebut.

Berdasarkan dengan uraian penulis, jelaslah bahwa peranan pemerintah desa selaku aparat pemerintah terendah yang langsung di bawah camat, sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan yang langsung berhadapan dengan masyarakat yang ada di wilayahnya, dan sangat besar artinya bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai administrator pemerintah dibantu oleh perangkat desa lainnya. Di dalam menjalankan program pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya kepala desa memerlukan adanya bantuan dari seluruh lapisan masyarakat disamping kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah atau kepala desa sendiri, guna untuk dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan.

Seorang kepala desa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin, dalam arti menggerakkan warganya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan daerahnya. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan di sebuah wilayah tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pihak dalam wilayah tersebut. Hal ini menjadi penting ketika perubahan dalam suatu wilayah akan berdampak langsung terhadap keseluruhan komponen yang berada dalam wilayah tersebut, termasuk didalam masyarakat. Berbagai bentuk kemunduran ataupun kemajuan yang terjadi akan berdampak terhadap kesejahteraan dan kepuasan masyarakat yang berada

dalam wilayah tersebut. Sehingga, untuk memperbesar peluang kemajuan dan memperkecil risiko kemunduran, posisi masyarakat sangatlah strategis dalam pembangunan sebuah wilayah. Peran serta yang dilakukan masyarakat dapat mempercepat ataupun memperlambat proses pencapaian tujuan disebuah wilayah.

Namun, permasalahannya adalah apakah masyarakat secara sukarela ingin dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan sebuah wilayah. Tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhi bentuk dan jenis keterlibatan masyarakat dalam sebuah pembangunan. Semisal tersedia tidaknya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, ataupun seberapa besar masyarakat peduli terhadap pembangunan yang terjadi di wilayahnya. Untuk itu, dibutuhkan pula aktor lainnya dalam mempengaruhi besar tidaknya partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu pemerintah di wilayah tersebut. Sebagai sebuah institusi yang memiliki otoritas legal dalam mengatur wilayahnya, pemerintah memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti kewenangan yang didukung oleh peraturan Peran pemerintah desa dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat Di Desa Watumerak, dalam menyediakan ruang partisipasi, serta menentukan besarnya ruang disediakan bagi masyarakat.

Hal ini merupakan cukup penting ketika dalam banyak kasus tingkat partisipasi masyarakat tidak bergantung dari ruang yang disediakan oleh

pemerintah. Ada banyak ruang lainnya, dimana masyarakat mampu berpartisipasi diluar jangkauan pemerintah namun masih dilindungi oleh peraturan perundangan, ataupun pembangunan fasilitas umum bersama secara swadaya. Pemerintahan desa dapat dianggap sebagai bentuk pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Sebagai bentuk pemerintahan yang memiliki keterbatasan dari segi luas wilayah serta populasi dibandingkan tingkat pemerintahan kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi, akan berakibat terjangkaunya akses masyarakat ditingkat pemerintahan desa. Kondisi ini dapat berakibat pula pada tingkat partisipasi masyarakat dan mudahnya pemerintahan desa untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan wilayah. Desa Watumerak, berlokasi di Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka.

Pemerintah Desa Watumerak memiliki lembaga kemasyarakatan yang berguna untuk menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan Pedesaan, tetapi belum efektif pelaksanaannya. Kurangnya aparat pemerintahan desa yang tidak mengikutsertakan masyarakat dalam merencanakan dan mengambil kebijakan program pembangunan desa. Padahal sudah ada lembaga kemasyarakatan sebagai ruang untuk mengekspresikan tujuan bersama dalam merancang program yang dibutuhkan masyarakat. Sebagaimana tujuan dari pembangunan desa adalah untuk pemerataan kesejahteraan penduduk desa.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah seperti yang diuraikan sebelumnya, serta luasnya permasalahan terhadap peran pemerintah desa, maka perlu adanya pembatasan dan rumusan masalah.

a) Batasan Masalah

Untuk membatasi masalah yang terjadi pada Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Di Desa Watumerak Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka maka penulis hanya membatasi pada: peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan di Desa Watumerak, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan di Desa Watumerak.

b) Rumusan Masalah

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan di dalam menguraikan “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan” maka pada pembahasan ini dapat dikemukakan rumusan masalah, seperti berikut :

- 1) Bagaimana peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Watumerak ?
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pembangunan di Desa Watumerak ?

Ke dua pokok permasalahan di atas, akan di jadikan sebagai dasar atau landasan dalam merumuskan masalah pada pembahasan yang selanjutnya .

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari hasil penelitian yang ingin di lakukan nanti, antara lain:

- a) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Watumerak di dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat di wilayah Desa Watumerak untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan.
- b) Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pengaruh dalam pembangunan

2. Kegunaan penelitian

- a) Dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi pemerintah desa pada Desa Watumerak, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat.
- b) Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi setiap peneliti yang juga ingin mengadakan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- c) Sebagai sebuah syarat untuk memperoleh ijazah, pada Universitas Bosowa Makasar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian teori

a) Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dan masyarakat merupakan dua kalimat yang saling memberikan pengertian tersendiri, untuk lebih jelasnya maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut: Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat. Partisipasi masyarakat di bidang pembangunan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Ketercapaian pembangunan yang ingin disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakatnya, diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga harus dapat mengikutsertakan masyarakat untuk ikut ambil dalam kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam sebuah pembangunan maupun kebijakan dari pemerintah. Partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan maupun kebijakan pemerintah akan mempermudah pemerintah untuk lebih memahami aspirasi dari masyarakat.

Sastrod Ipoetra (dalam Rohman, dkk, 2009: 46) menyatakan “partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Sedangkan Nyoman Sumaryadi (2010:46) berpendapat : Partisipasi merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan pihak lain.

Partisipasi berarti perhatian mendalam mengenai perbedaan dan perubahan yang akan dihasilkan dalam suatu pembangunan sehubungan dengan kehidupan masyarakat. partisipasi merupakan kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak-pihak lain untuk suatu kegiatan. Partisipasi adalah suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah sebuah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena, di antara banyak hal, partisipasi terkait erat dengan gagasan HAM (Jim Ife, 2008:295).

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan (Rahardjo, 2006:34).

Partisipasi masyarakat berarti adanya keterlibatan masyarakat biasa dalam urusan-urusan setempat secara langsung. Midgley memperjelas pengertian partisipasi masyarakat ini dengan mengacu pada awal 1970an, pencapaian peluang yang memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan dan mempengaruhinya serta menikmati manfaat pembangunan tersebut secara merata. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat terlihat berdasarkan tahapan-tahapan tertentu mulai dari tanpa adanya partisipasi masyarakat hingga partisipasi masyarakat secara penuh. Keterlibatan masyarakat dalam sebuah pembangunan, tentunya untuk menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat agar dapat tercipta pembangunan seperti yang masyarakat harapkan.

b) Bentuk partisipasi

Partisipasi dari berbagai pengertian konsep. Partisipasi kemudian dapat dibedakan pula jenis atau bentuk. Menurut Davis seperti yang dikutip oleh Sastropetro (1988:16), mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut, yaitu:

- 1) Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa. Arenstein dalam panudju (1999:69-76) yaitu konsultasi mengundang opini masyarakat kemudian memberikan informasi kepada masyarakat yang merupakan langkah penting dalam menuju partisipasi penuh dari masyarakat. Akan tetapi penilaian masyarakat tentang keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa

kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering dipergunakan adalah survey tentang arah pikir masyarakat, pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar-pendapat dengan masyarakat.

- 2) Sumbangan spontan berupa barang.
- 3) Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berada diluar lingkungan tertentu (dermawan, pihak ketiga).
- 4) (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti, antara lain rapat desa yang menentukan anggarannya).
- 5) Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat.
- 6) Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri.
- 7) Membangun proyek komuniti yang bersifat otonom.

Adapun tingkatan partisipasi menurut Arenstein adalah:

1. Kekuasaan masyarakat, yang terdiri dari pengawasan masyarakat, pendelegasian kekuasaan dan kemitraan.
2. Takonisme, yang terdiri dari, peredaman kemarahan, dan konsultasi (partisipasi semu).

Partisipasi semu adalah: partisipasi yang digunakan oleh orang luar atau kelompok elit untuk maksud dan tujuan sendiri dan sementara masyarakat hanya dijadikan sebagai obyek. dalam implementasinya berupa mobilisasi masyarakat dengan tujuan untuk

memanipulasi seolah-olah masyarakat telah ikut berpartisipasi dengan tujuan agar program yang telah dirumuskan oleh pengambil kebijakan mendapat legitimasi, model pendekatan yang sering dilakukan adalah dengan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan agar dapat menentramkan masyarakat tetapi keputusannya tetap berada ditangan pemerintah, model ini menggunakan terapi seolah olah masyarakat tidak tahu apa apa. dan harus percaya terhadap apa yang diputuskan oleh pemerintah.

3. Non-partisipasi, terdiri dari therapy dan manipulasi.

Kemudian Davis juga mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat seperti yang dikutip oleh Sastroseto (1988:16), yaitu sebagai berikut:

1. Pikiran (psychological participation).
2. Tenaga (physical participation).
3. Pikiran dan tenaga (psychological dan physical participation)
4. Keahlian (participation with skill).
5. Barang (material participation).
6. finansial

c) Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan suatu kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan.

Pembagian kewenangan berdasarkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Arnstein (1969) menjelaskan partisipasi sebagai arti yang dimana warga negara dapat mempengaruhi perubahan sosial penting yang dapat membuat mereka berbagi manfaat dari masyarakat atas. Dia mencirikan delapan anak tangga yaitu: manipulasi, terapi, memberitahu, konsultasi, penentrangan kerjasama, pelimpahan kekuasaan, dan kontrol warga negara. Salah satu persyaratan utama keberhasilan proses pembangunan adalah partisipasi masyarakat, namun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi di lapangan dalam proses melaksanakan pembangunan yang partisipatif. Hambatan akan timbul jika pihak perencana dan pelaksana pembangunan (pemerintah) belum memahami secara keseluruhan mengenai konsep partisipasi. Definisi partisipasi yang berlaku di lingkungan aparat perencana dan pelaksana pembangunan adalah kemauan masyarakat untuk mendukung secara mutlak program-program yang di pemerintah yang dirancang dan tujuannya sudah ditentukan oleh pemerintah.

Proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah disebut sebagai proyek pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan proyek-proyek pembangunan yang berasal dari masyarakat

dianggap sebagai keinginan , oleh karena itu proyek ini menjadi prioritas yang rendah dari pemerintah. Definisi inilah yang berlaku secara universal tentang partisipasi. Oleh karena itu para perencana dan pelaksana pembangunan dalam hal ini pemerintah harus memahami secara benar konsep-konsep untuk mendukung lahirnya partisipasi masyarakat dari bawah agar mencapai hasil-hasil pembangunan yang dapat berkelanjutan.

Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam partisipasi karena pendekatan pembangunan partisipasi harus dimulai dari orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri. Pengembangan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan nilai masyarakat, dan memberikan sarana yang perlu bagi masyarakat supaya dapat mengembangkan diri. Pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perencanan dan pelaksana program atau proyek yang akan mewarnai hidup masyarakat, sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa ikut dipertimbangkan secara penuh dan membuat umpan balik yang pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam kegiatan pembangunan.

d) Pengertian Pembangunan

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan

berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Menurut Siagian, 2005:4), memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu kegiatan yang disengaja antara pemerintah dan melibatkan peran serta masyarakat dalam menuju usaha modernitas dengan perencanaan yang arah.

Pembangunan Desa merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mangangkut hasil pertanian agar lebih mudah. Pembangunan desa, bukan yang hal baru lagi, yang bertujuan untuk menentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan masyarakat, dalam penelitian ini konsep pembangunan dari PNPM Mandiri Perdesaan dapat

dirasakan oleh masyarakat desa. Hasil dari pembangunan desa yang berupa pembangunan fisik yang telah dilakukan dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang merasakan hasil dari proyek tersebut.

e) Tujuan pembangunan

Tujuan pembangunan yang dilaksanakan di setiap desa harus sesuai dengan apa yang dihadapi di desa tersebut, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan.

Tujuan pembangunan pedesaan secara jelas adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Sasaran pembangunan pedesaan adalah terciptanya:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas
2. Percepatan pertumbuhan desa
3. Peningkatan keterampilan dalam memproduksi dan pengembangan lapangan
4. kerja dan lapangan usaha produktif.
5. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat.
6. Perkuatan kelembagaan.

f) Pengertian desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten/Kota, dan Desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Pengertian desa secara resmi dapat ditulis sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif.

g) Pengertian Peranan

Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989) Menurut Soekanto (1990:268) peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Artinya adalah posisi yang dimiliki seseorang tersebut seperti kepala desa yang merupakan pemerintahan desa, dengan posisi tersebut pemerintah desa akan lebih memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Adapun peranan seseorang seperti yang dikatakan oleh Levinson (1996:204) yaitu:

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan disini di artikan sebagai rangkaian peraturan yang memimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2000: 304) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu peristiwa. Pendapat Ali tersebut mengandung maksud yaitu dengan adanya posisi tertentu, maka seseorang yang lebih memiliki tanggung jawab dalam kehidupan sosial akan lebih besar peran dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

h) Pengertian kepemimpinan dan motivasi kerja

1) Kepemimpinan

Pada dasarnya kepemimpinan merupakan salah satu fungsi manajemen yang strategis, karena kepemimpinan dapat menggerakkan sumber daya secara efektif dan efisien kearah pencapaian tujuan. Keberadaan kepemimpinan menjadi lebih penting untuk mengembangkan

visi dan misi organisasi masa depan. Setiap dan semua organisasi apapun jenisnya pasti memiliki dan memerlukan seorang pemimpin tertinggi (pimpinan puncak) atau manejer tertinggi (top maneger) yang harus menjalankan kegiatan kepemimpinan (leadership) bagi keseluruhan organisasi sebagian atau kesatuan.

Menurut Gary Yukl berpendapat bahwa; “kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang perlu dikerjakan dan bagaimana tugas itu dapat dilakukan secara efektif, dan proses memfasilitasi usaha individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Berikutnya Harold Koontz, Cyril O'Donnel dan Heinz Weihrich mengatakan bahwa kepemimpinan adalah seni atau proses mempengaruhi orang (anggota organisasi) sehingga akan berusaha mencapai tujuan organisasi dengan kemauan dan antusiasme yang tinggi. Pernyataan kepemimpinan sebagai seni pada dasarnya bermakna kemampuan menciptakan hubungan manusiawi berupa pengaruh yang menyenangkan dan memuaskan bagi anggota organisasi/orang lain, sehingga bersedia melakukan suatu kegiatan/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak ada pola yang pasti dalam mewujudkan pengaruh tersebut sebagai seni, karena sangat tergantung pada potensi dan karakter pemimpin dalam menggunakan keterampilan sosialnya. Disamping itu usaha mempengaruhi tersebut harus dilakukan secara terus menerus sebagai suatu proses atau suatu rangkaian kegiatan yang berkesinambungan, untuk menghasilkan

kemauan dan antusiasme anggota organisasi dalam melakukan kegiatan masing-masing.

Kegiatan mempengaruhi itu menurut Stephen P. Robbins, (1996:66) berarti pemimpin mempunyai kemauan, keterampilan dan seni untuk mengarahkan dan mengajak anggota organisasi/bawahannya. Dengan kata lain pemimpin harus mampu menggali dan merealisasikan potensi-potensi yang dimiliki anggota organisasi/bawahannya secara ikhlas untuk kepentingan organisasi. Keterampilan itu mencakup :

- 1) Keterampilan menganalisis cara-cara mempengaruhi unjuk kerja/kinerja.
- 2) Keterampilan dan kemampuan untuk menciptakan kerja yang mendukung.
- 3) Keterampilan dan kemampuan untuk mengubah perilaku anggota organisasi/bawahan.

Menurut Jacobs dan Jacques dalam buku Sofyandi dan Garniwa, (2007:174), kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran. Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah sebagai proses pengarahan dan mempengaruhi para karyawan/bawahannya dalam aktivitasnya yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok. Dan apabila kita

berbicara mengenai kepemimpinan maka tidak akan terlepas dari siapa yang memimpin dan sering disebut dengan pemimpin.

2) Motivasi

D. Pengertian motivasi

Motivasi berasal dari bahasa latin, *move* yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Dalam bahasa inggris disebut dengan *motivation* yang berarti pemberian motif, hal yang menimbulkan dorongan. Daya dorong yang ada dalam diri seseorang sering disebut motif. Daya dorong diluar diri seseorang, harus ditimbulkan oleh pimpinan agar hal-hal diluar diri seseorang itu turut mempengaruhinya, pemimpin harus memiliki berbagai sarana atau alat yang sesuai dengan orang lain.

Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang ditentukan. Pimpinan atau manajer adalah orang-orang yang mencapai hasil-hasil melalui orang lain, yaitu para bawahan. Berhubung dengan hal itu, menjadi kewajiban dari setiap pemimpin agar para bawahannya berprestasi. Prestasi bawahan, terutama disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu: kemampuan dan daya dorong.

Kemampuan seseorang ditentukan oleh kualifikasi yang dimilikinya antara lain oleh pendidikan, pengalaman, dan sifat-sifat pribadi. Sedangkan daya dorong dipengaruhi oleh sesuatu yang ada dalam diri seseorang dan hal-hal lain diluar dirinya. Motivasi kerja adalah

melakukan pekerjaan secara giat, sehingga pekerjaan diharapkan lebih cepat selesai dan lebih baik hasilnya.

Ada beberapa pengertian tentang motivasi menurut para ahli, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Malayu S.P Hasibuan (2001:42), sebagai berikut: Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan.
- b. Menurut Robbins dalam buku Sofyandi dan Gunawan (2007:99), yaitu : Motivasi adalah sebagai proses mengarahkan dan ketekunan setiap individu dengan tingkat intensitas yang tinggi untuk meningkatkan suatu usaha dalam mencapai tujuan.
- c. Menurut James L. Gibson menyatakan bahwa: “motivasi merupakan sebuah konsep yang kita gunakan, apabila kita menerangkan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi seorang individu atau yang ada dalam diri individu tersebut, yang mengisiasi dan mengarahkan perilaku”.

Dari beberapa defenisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, motivasi kerja adalah dorongan serta arahan kepada individu untuk melakukan suatu kegiatan ataupun bertindak lebih untuk meningkatkan hal yang dilakukan oleh individu tersebut.

E. Tujuan motivasi

Berikut ini ada beberapa tujuan motivasi menurut Malayu S.P Hasibuan (2001:161), yaitu:

- a) Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan.
- b) Meningkatkan produktivitas kerja karyawan.
- c) Meningkatkan kedisiplinan karyawan.
- d) Mempertahankan kestabilan karyawan.
- e) Mengefektifkan pengadaan karyawan.
- f) Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik.
- g) Meningkatkan loyalitas, kreatifitas dan partisipasi karyawan.
- h) Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan.
- i) Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya.
- j) Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku.

F. Kerangka konseptual

Untuk pemerataan pembangunan keseluruhan masyarakat Indonesia, pemerintah berusaha terus untuk meningkatkan pembangunan di daerah-daerah. Untuk mencapai usaha pemerintah mengambil kebijakan inpres bantuan desa yang diberikan kepada daerah-daerah disetiap tahun anggaran pemberian bantuan desa tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan mereka dengan dibangunnya sarana dan prasarana.

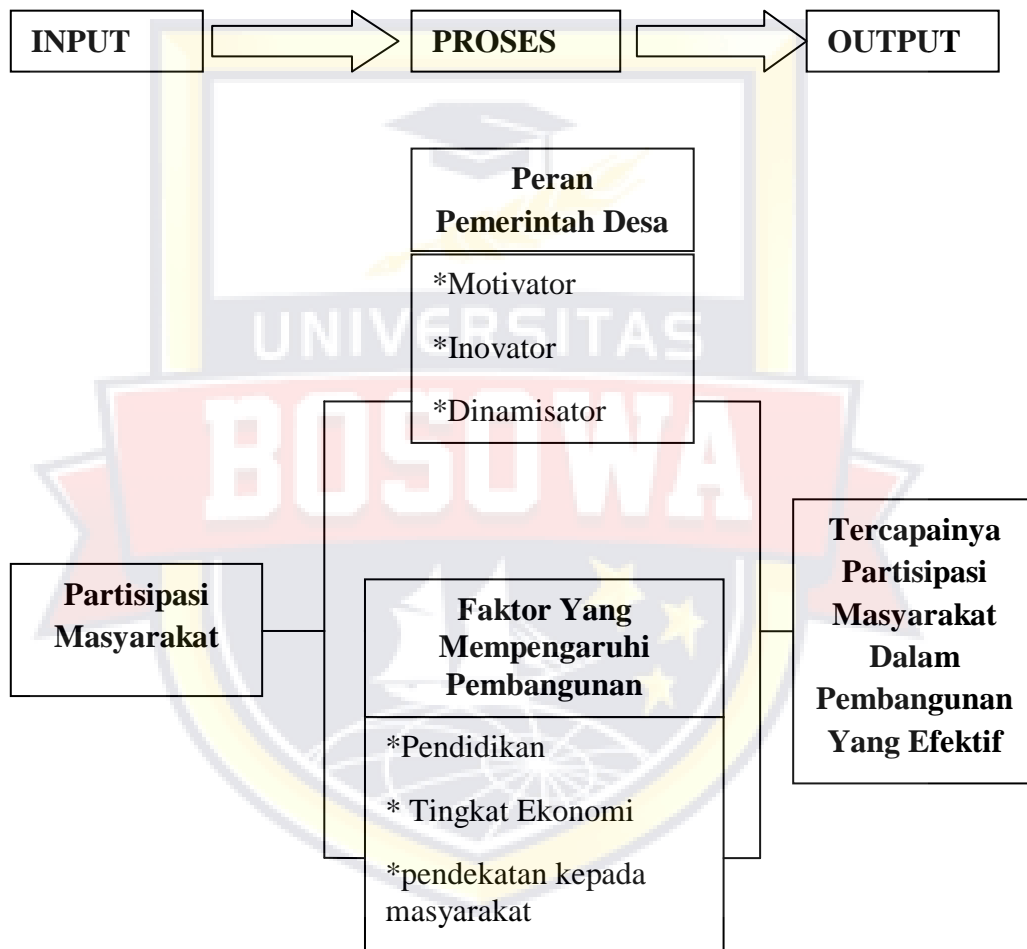
Selain tujuan pemberian inpres tersebut, juga ditujukan untuk merangsang masyarakat agar dapat turut serta dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan. Disinilah peranan dari seorang pemimpin dalam hal ini pemerintah desa dibutuhkan untuk mengikutsertakan masyarakatnya dalam setiap pelaksanaan pembangunan.

Untuk nilai-nilai atau lembaga dalam masyarakat perlu didorong agar bernilai positif terhadap pembangunan yang dijalankan. Hal ini sejalan dengan pendapat I Nyoman Beratha,(1982:71) menjelaskan bahwa; “institusi-institusi kemasyarakatan seperti gotong-royong, pemufakatan, permusyawaratan dan lain-lain sebagainya yang hidup dalam masyarakat perlu diperiksa dengan seksama untuk akhirnya nilai-nilai positif dari institusi itu dapat berkembang dan untuk kepentingan nasional pada umumnya.”

Dari uraian diatas nampak jelas bahwa pembangunan dapat berjalan lancar apabila didukung oleh segenap lapisan masyarakat, mulai dari pimpinan dalam hal ini pemerintah desa sampai pada lapisan masyarakat bawah. Untuk itu pemerintah harus memainkan peran aktif untuk memberikan bimbingan, motivasi,menyampaikan kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan, dan mengelolah pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya bagaimana pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan bagaimana partisipasinya dapat di gambarkan pada skema konseptual berikut

Bagan Kerangka konseptual



Dari gambaran di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah desa pada saat ini, dalam upaya merangsang masyarakat untuk turut serta berpartisipasi oleh setiap pembangunan yang dilaksanakan maka disiapkan berbagai sarana-prasarana pembangunan agar seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan waktu penelitian

1) Tempat penelitian

Penelitian ini bertempat dikantor Desa Watumerak, dan lokasi program pembangunan sedang berlangsung. Lokasi tersebut dipilih karena kasus yang akan diteliti benar-benar ada di desa tersebut.

2) Waktu penelitian

Penelitian akan dilaksanakan jika setelah selesai seminar proposal, dengan lokasi yang bertepatan di Desa Watumerak, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka.

Jadwal kegiatan	Pelaksanaan							
	April				Mei			
	1	2	3	4	1	2	3	4
1.observasi								
2.pelaksanaan								
3.pengumpulan data								

B. Tipe dan dasar penelitian

- a) Penelitian ini dapat digolongkan dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu, penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain.

- b) Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian kualitatif yaitu, penyajian data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat dan gambar.

C. Sumber data

Hal yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang konkrit adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa, *observasi* merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentas yang

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

D. Informan penelitian

Untuk mempermudah di dalam penelitian, peneliti dapat mengumpulkan data lainnya dengan cara melakukan studi dokumentasi seperti profil pada Desa Watumerak.

Sebagai instrument utama dalam penelitian untuk melengkapi data dari informan, maka peneliti menentukan informan yang akan di wawancarai yaitu:

1. Kepala Desa dan sekertaris
2. BPD
3. Perwakilan dari masing-masing dusun
 - a) Dusun Watulagar : 3 orang
 - b) Dusun Bora : 3 orang
 - c) Dusun Watupedar : 3 orang
4. Tokoh pemuda masyarakat : 4 orang

E. Teknik pengumpulan data

Dalam metode penelitian kualitatif lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data. Pada pendekatan ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata laporan dan pandangan informan dan melakukan study pada situasi yang dialami (Creswell, 1998:15) sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara terperinci perlu ditegaskan bahwa hal penting yang harus dipahami oleh peneliti adalah alasan mengapa masing-masing teknik tersebut dipakai, untuk memperoleh informasi apa dan pada bagian fokus penelitian mana yang memerlukan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Observasi

Yaitu peneliti akan terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari dan mengamati orang yang dijadikan sebagai sumber data penelitian.

2. Interview (wawancara)

Yaitu mengkonfirmasi data-data yang kurang jelas yang diperoleh dari observasi

F. Teknik analisis data

Analisis data menurut Patton dalam bukunya Moleong (2000:103), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian besar. Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif yaitu: data yang terkumpul dan dianalisis kemudian dideskripsikan. Dalam penelitian ini akan diperoleh gambaran tentang peranan pemerintah desa

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, mulai dari proses sampai pada tahapan selanjutnya.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 4(empat) tahap, sesuai dengan pendapat Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992:16-20), yaitu:

1. Pengumpulan data, peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan interview di lapangan.
2. Reduksi data, diartika sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstakan dan transformasi data-data”kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Miles dan Huberman (Sugiyono.2010:338) mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
3. Penyajian data, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Akan tetapi yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Kesimpulan/ verifikasi data, didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.



BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI DATA

A. Keadaan Geografis

1) Batas Wilayah

Dalam bagian ini akan dikemukakan secara singkat tentang keadaan geografis yang ada di Desa Watumerak, utamanya pada aspek-aspek geografis yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan dalam wilayah Desa Watumerak.

Secara geografis batas-batas administratif Desa Watumerak adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan hutan kawasan dan Kecamatan Waigete.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wolonterang Kecamatan Doreng.
- 3) Sebelah timur berbatsan dengan Desa Wogalirit Kecamatan Doreng.
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kloangpopot Kecamatan Doreng.

2) Letak Dan Jarak Desa Watumerak

Desa Watumerak adalah salah satu desa dari Kecamatan Doreng yang berada di bagian barat kecamatan Doreng. Desa Watumerak terletak

13 km dari Kota Kecamatan Doreng, dengan lama jarak tempuh jika menggunakan kendaraan bermotor selama $\frac{1}{2}$ jam, dan lama tempuh dengan berjalan kaki selama 2 jam.

Sementara jarak tempuh menuju ibu Kota Kabupaten Sikka ialah 27 km dengan lama jarak tempuh jika menggunakan kendaraan bermotor selama 2 jam, dan lama tempuh dengan berjalan kaki selama 18 jam. Untuk dapat mencapai lokasi Kota Kabupaten sangat mudah, karena sudah ada banyaknya kendaraan, namun sarana dan prasarananya yang belum begitu memuaskan.

3) Kondisi Demografis Desa Watumerak

Desa Watumerak ialah desa yang letaknya di dataran tinggi atau pegunungan dengan suhu udara yang begitu dingin karena di pengaruhi oleh jaraknya yang cukup jauh dari pesisir, dan angin darat serta jumlah pepohonan yang begitu banyak, memiliki ketinggian 350 ha/m², berbukit-bukit 350 ha/m², mempunyai hutan kawasan seluas 50 ha/m².

Selain wilayah yang merupakan dataran tinggi, Desa Watumerak juga mempunyai tanah yang cukup subur dan areal pertanian yang luas, yang merupakan salah satu potensi wilayah yang meningkatkan produksi untuk petani yang berkebun.

Sejalan dengan kondisi alam dan letak geografis yang ada . Mata pencaharian penduduk yang bermukim di Desa Watumerak sangat bervariasi ada sebagian besar sebagai petani, namun ada juga yang

berprofesi sebagai guru, pegawai, penjahit, POLRI, TNI, tukang dan pedagang sayur-sayuran.

B. SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN

Salah satu faktor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sehubungan dengan hal ini dalam rangka untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun efektifitas pelayanan publik, maka sarana dan prasarana harus tersedia sebagai penunjang kegiatan dalam pemerintahan desa.

Tabel 4.1 : Keadaan sarana dan prasarana di Desa Watumerak antara lain:

Fasilitas	Jumlah	Kondisi
Mesin ketik	1	Baik
Komputer	1	Baik
Meja	9	Baik
Kursi	58	Baik
Lemari arsip	4	Baik
Buku data perangkat desa	1	Baik
Papan pengumuman	1	Baik
Kendaraan dinas	Tidak ada	Tidak ada
Papan data	1	Baik
JUMLAH	77	Baik

Sumber : Kantor Desa Watumerak 2016

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di Desa Watumerak sudah memadai, dan sebagai pendukung di dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dalam

pembangunan yang semakin banyak, serta tuntutan pelayanan yang lebih cepat dan akurat dari masyarakat.

Untuk menunjang kelancaran urusan di Desa Watumerak dalam hal ini penggunaan transportasi, maka pemerintah harus memperhatikan keadaan Sarana dan Prasarana transportasi darat yang ada di Desa Watumerak dapat dilihat dari kondisi jalan dan jumlah transport yang ada.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut, yang akan menggambarkan keadaan Sarana Transportasi di Desa Watumerak.

Tabel 4.2 : keadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat di Desa Watumerak

Sarana	Jumlah/Kilometer	Kondisi
Jalan Aspal	-	-
Jalan Rabat	20 km	Rusak sedang
Jembatan	2 buah	Baik
Jalan Setapak	5 km	Berlubang

Sumber : Kantor Desa Watumerak 2016

Salah satu kegiatan dalam meningkatkan kesegaran jasmani dalam meningkatkan kualitas fisik ialah dengan berolahraga .Untuk sarana dan prasarana di bidang olahraga yang dimiliki oleh Desa Watumerak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 : keadaan sarana dan prasarana olahraga di Desa Watumerak

Jenis olahraga	Jumlah	Kondisi
Lapangan takrow	1	Rusak sedang
Lapangan bola	1	Baik
Lapangan bola volley	3	2 baik dan 1 rusak

Sumber : Kantor Desa Watumerak 2016

C. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah wilayah. Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah.

a. Jumlah penduduk

Tabel 4.4 : jumlah penduduk Desa Watumerak

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Watupedar	188 orang	211 orang	399 orang
2.	Bora	191 orang	208 orang	399 orang
3.	Watulagar	201 orang	203 orang	404 orang
Jumlah Total Penduduk				1.202 orang

Sumber : Kantor Desa Watumerak 2016

Desa watumerak memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.202 jiwa, dengan klarifikasi sebagai berikut:

1. Dusun Watupedar sebanyak 399 orang diantaranya 188 orang laki-laki, 211 orang perempuan,

2. Dusun Bora sebanyak 399 orang diantaranya 191 orang laki-laki, 208 orang perempuan dan
3. Dusun Watulagar sebanyak 404 orang diantaranya 201 orang laki-laki, 203 orang perempuan.

Jumlah kepala keluarga yang ada Desa Watumerak sebanyak 248

KK. Dengan klarifikasi sebagai berikut:

1. 222 KK laki-laki dan
2. 26 KK perempuan.

Sumber : Kantor Desa Watumerak 2016

b. Usia

Penduduk di Desa Watumerak berada pada usia 0-12 bulan dan 1 tahun-76 tahun keatas. Dengan klarifikasi sebagai berikut:

Usia 0-12 bulan 14 orang diantaranya 6 orang laki-laki dan 8 orang perempuan, Usia 1 tahun-10 tahun sebanyak 202 orang, 111 orang laki-laki dan 93 orang perempuan, Usia 11 tahun-20 tahun sebanyak 159 orang, 77 orang laki-laki dan 82 orang perempuan, Usia 21 tahun-30 tahun sebanyak 159 orang, 70 orang laki-laki dan 89 orang perempuan.

Usia 31 tahun-40 tahun sebanyak 129 orang, 49 orang laki-laki dan 80 orang perempuan, Usia 41 tahun-50 tahun sebanyak 289 orang, 133 orang laki-laki dan 156 orang perempuan, Usia 51-60 tahun sebanyak 299 orang, laki-laki 151 orang dan perempuan 148 orang, Usia 61-70 tahun sebanyak 40 orang, laki-laki 40 orang dan perempuan 40 orang, serta Usia 71-76 tahun sebanyak 64 orang, 32 orang laki-laki, 32 orang perempuan.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang tidak kalah penting dan paling utama yang harus dimiliki oleh setiap individu dibandingkan dengan yang lain. Karena dengan adanya tingkat pendidikan dan pengetahuan tentu sudah merupakan sebuah sarana bagi setiap manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan di bekali pendidikan yang cukup merupakan sebuah modal bagi seseorang untuk dapat menyelesaikan atau memecahkan masalah yang akan dihadapinya, dan dapat melaksanakan setiap kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tabel 4.5 : Jumlah Tingkat Pendidikan Desa Watumerak

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	65 orang
2.	Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	12 orang
3.	Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	162 orang
4.	Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	66 orang
5.	Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	620 orang
6.	Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	61 orang
7.	Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	12 orang
8.	Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	26 orang
9.	Jumlah penduduk tidak tamat SLTA/ sederajat	44 orang
10.	Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat	532 orang
11.	Jumlah penduduk tamat D-2	2 orang

12.	Jumlah penduduk sedang D-3	11 orang
13.	Jumlah penduduk tamat D-3	11 orang
14.	Jumlah penduduk sedang S-1	28 orang
15.	Jumlah penduduk tamat S-1	19 orang

Sumber : Kantor Desa Watumerak 2016

Di lihat dari tabel data diatas, jelas bahwa jumlah penduduk Desa Watumerak dengan tingkat pendidikan paling banyak ialah penduduk dengan tamatan SD/ sederajat dengan jumlah sebanyak 620 orang dan tamatan SLTA/ sederajat dengan jumlah 532 orang dan yang paling sedikit ialah penduduk tamat D-2 yaitu 2 orang.

d. Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah salah satu faktor yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia pada umumnya, karena melalui kegiatan ini penduduk akan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Tabel 4.6 : Mata Pencaharian Di Desa Watumerak

NO	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Petani	303 orang	240 orang	543 orang
2.	PNS	5 orang	8 orang	13 orang
3.	Tukang	7 orang	-	7 orang
4.	Pedagang pasar	23 orang	34 orang	57 orang

Sumber : Kantor Desa Watumerak 2016

Berdasarkan data pada tabel diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Watumerak Kecamatan Doreng adalah sebagai berikut: di bidang pertanian sebanyak 543 orang, penduduk sebagai PNS sebanyak 13 orang, penduduk sebagai tukang sebanyak 7 orang dan penduduk sebagai pedagang pasar sebanyak 57 orang.

e. Agama

Tabel 4.7 : Agama Yang Dianut Di Desa Watumerak

NO	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	-	-	-
2.	Kristen protestan	-	-	-
3.	Kristen katolik	561	591	1.152
4.	Budha	-	-	-

Sumber : Kantor Desa Watumerak 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat Desa Watumerak Kecamatan Doreng penduduknya adalah mayoritas beragama Kristen katolik.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Tabel Keadaan pegawai Desa Watumerak Kecamatan Doreng di lihat dari struktur organisasi, tahun 2016.

Tabel 4.8 : Struktur Organisasi Yang Ada Di Desa Watumerak

NO	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala desa	1 orang

2.	Sekretaris desa	1 orang
3.	Kaur desa	3 orang
4.	Kepala seksi	3 orang
5.	Kepala dusun	3 orang
6.	BPD	5 orang
Jumlah		16 orang

Sumber : Kantor Desa Watumerak 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa pegawai Desa Watumerak Kecamatan Doreng secara keseluruhan berjumlah 16 orang. Dengan personil yang terbagi dalam 1 orang terdiri dari 1 orang kepala desa, 1 orang sekretaris, 3 orang kaur desa yang mengurus bidang masing-masing, 3 orang kepala seksi yang mengurus bidang masing-masing, 3 orang kepala dusun dan 5 orang BPD.

E. POTENSI KELEMBAGAAN

a. Lembaga Pemerintahan dan Tugasnya

Pemerintah Desa Watumerak mempunyai dasar hukum pembentukan pemerintah desa dan dasar hukum pembentukan BPD yang berdasarkan pada perda/keputusan bupati/camat dan badan hukum.

Jumlah perangkat desa dan tugasnya masing masing yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa : Kepala Desa mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah umum dan urusan pemerintah daerah di wilayahnya.

2. Sekertaris Desa : Sekertaris desa mempunyai tugas membantu kepala desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat lain.
3. Kepala Urusan Pemerintahan : mempunyai tugas membantu kepala desa dalam pembinaan pemerintahan.
4. Kepala Urusan Pembangunan : mempunyai tugas membantu kepala desa dalam pembinaan pembangunan.
5. Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat : mempunyai tugas melakukan usaha meningkatkan partisipasi masyarakat.
6. Kepala Urusan Keuangan/Bendahara : mempunyai tugas mengelola keuangan yang ada di desa.
7. Kepala Seksi Pajak : mempunyai tugas memeriksa pajak yang ada di desa
8. Kepala Seksi Trantib : mempunyai tugas melakukan kegiatan mengenai pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah
9. Kepala Dusun di tiga lingkungan : mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional kepala desa dalam wilayah kerjanya.

Tingkat pendidikan aparat Desa Watumerak:

1. Kepala Desa D3,
2. Sekertaris Desa SMA,
3. Kepala Urusan Pemerintahan SMEA,
4. Kepala Urusan Pembangunan SMK,

5. Kepala Urusan Pemberdayaan masyarakat SMA,
6. Kepala Keuangan/Bendahara SMK,
7. Kepala kasie pajak SMEA,
8. Kepala kasie trantib SMA.

b. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang saat ini masih aktif. Yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

B. PEMBAHASAN

A. PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam kebijakan dan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pelindung masyarakat.

Suksesnya setiap pembangunan yang ada di pedesaan sangat ditentukan oleh peranan dari setiap pimpinan khususnya kepala desa sebagai kepala wilayah atau pemerintahan. Pelaksanaan suatu

kepemimpinan pada dasarnya mengalir dari atas ke bawah atau sebaliknya, Sama halnya juga dengan yang terjadi di kantor Desa Watumerak dalam hal ini pemegang kepemimpinan tertinggi adalah kepala desa dan selanjutnya menurun berturut-turut sampai pada tingkat yang paling rendah.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kepala desa merupakan pemimpin di daerahnya yang bertugas untuk memelihara lancarnya roda pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, serta memelihara keamanan dan ketertiban umum serta menjalankan tugas pemerintah desa.

Di dalam asas dekosentrasi tercermin jalur kepemimpinan nasional yang dimana dapat menjamin kesatuan bangsa dan Negara dalam wawasan nusantara. Dengan adanya asas ini tercermin pula adanya kesatuan pemerintah yang tersusun secara hirarki kebawah melalui kepala-kepala wilayah.

Pembangunan dan perkembangan suatu desa merupakan hal terpenting dalam menciptakan kehidupan yang beradab. Pembangunan yang diselenggarakan pada hakekatnya adalah pembangunan masyarakat desa secara keseluruhan, dan tentu akan tertuju kepada masyarakat itu sendiri. Sehingga sangat tepat kalau dikatakan pembangunan dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pembangunan suatu desa juga tentu tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang ada di dalam desa tersebut. Partisipasi dari masyarakat

akan terlihat jika termotivasi oleh seorang pemimpin mengenai pentingnya untuk ikut serta dalam pembangunan, dan membangun kembali kesadaran masyarakat bahwa pembangunan tersebut adalah demi kepentingan dan kebutuhan bersama.

Partisipasi dan motivasi masyarakat tentunya dirangkaikan dalam sebuah hubungan dan kerjasama yang harmonis. Hal ini mungkin dianggap tidak mudah untuk tercapai, karena melihat kondisi dan karakter masyarakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kecerdasan dan keterampilan manajemen yang baik dan tepat dari seorang kepala desa sebagai seorang pemimpin.

1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Motivator

Keberhasilan pembangunan sebuah desa akan sangat ditentukan oleh sosok kepala desa sebagai figur pemimpin pemerintah desa. Seorang kepala desa harus dapat menggerakkan sumber daya manusia untuk dapat mencapai keberhasilan proses pembangunan, mulai dari perencanaan pelaksanaan dan pemeliharaan dari hasil hasil pembangunan yang di laksanakan.

Kepala Desa sebagai motivator pembangunan adalah berperan untuk menggugah dan mendorong dengan berbagai kebijakan yang lebih baik, agar selanjutnya masyarakat dapat tergugah hatinya untuk ikut berperan serta dalam setiap kegiatan, terutama kegiatan pembangunan jalan desa dan pembersihan jalan yang berlangsung di desanya.

Agar kepala desa sebagai seorang motivator dapat berhasil dengan baik, maka kepala desa harus mampu menggerakkan minat serta kemauan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan mampu memberikan petunjuk terhadap perseorangan, keluarga maupun kelompok untuk membangkitkan kemampuan sikap membangun serta mempertahankan sikap dalam melaksanakan gagasan-gagasannya. Dalam menjalankan peranannya sebagai motivator pembangunan serta peran aktif dari masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan fisik di desa.

Untuk dapat mengetahui peranan pemerintah desa sebagai motivator dalam pembangunan, maka dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut ini:

Menurut kepala desa Yozh Andreas Woda yang saat diwawancarai menjelaskan bahwa:

“masyarakat kami dari ketiga lingkungan ini partisipasi sudah begitu bagus, dari ketiga lingkungan yang ada ini partisipasi dari Dusun Watulagar lebih maju dari lingkungan lain ” (Jumad, 07 April 2017)

Berikut hasil wawancara dengan bapak Blasius Mite tokoh masyarakat dusun watulagar mengatakan bahwa :

“partisipasi masyarakat di desa ini cukup meningkat karena ada motivasi yang dibangun dari kepala desa kepada kami yaitu dengan memberikan penghargaan bagi dusun yang bagus partisipasinya ”(Senin 10 April 2017)

Selain itu hal yang sama juga di katakana oleh bapak Gabriel Manek mengatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat di Desa Watumerak ini meningkat karena setiap kali kalau selesai kami bekerja, kepala desa biasanya memberikan bantuan berupa peralatan kerja kepada kami para petani untuk dapat melancarkan pekerjaan perkebunan kami”(Senin, 10 April 2017)

Melihat dengan kejadian yang ada kepala desa mulai menekankan kembali agar jiwa partisipasi yang sebelumnya pudar agar dibangkitkan kembali melihat jiwa partisipasi sebelumnya sangat tinggi. Di sisi lain ada hal yang perlu diketahui bahwa Desa Watumerak masih sangat kental dengan sistem feodalnya. Akurnya prinsip kekeluargaan akan memberikan dampak yang positif dari setiap pembangunan, dimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dirasakan karena adanya rasa kepemilikan terhadap desa sangat tinggi.

Menurut Iknasius Iku (ketua RT 003 Dusun Watulagar) mengatakan bahwa:

“partisipasi masyarakat dari RT 003 ini sangat bagus, mereka biasa gotong royong dalam bekerjasama membersihkan jalan, selain itu kami juga biasa bersama-sama angkat kerikil untuk swadaya pembuatan bak penampung air.”(Selasa, 11 April 2017).

Hal sama dalam wawancara dengan Petrus Yansenus tokoh pemuda masyarakat mengatakan bahwa:

“partisipasi masyarakat di desa ini sangat terlihat antusias sekali, terlihat jelas baru baru ini ada badai angin kencang yang menghancurkan sekolah darurat. Pada saat itu juga terlihat partisipasi dari masyarakat mereka saling bantu membantu untuk bekerjasama membangun kembali sekolah darurat itu dalam waktu satu hari” (Kamis 6 April 2017)

Berikut ada juga wawancara dengan bapak Yosef Efi sekretaris BPD mengatakan bahwa:

“kalau partisipasi dari masyarakat sekarang sangat baik mereka sangat antusias jika ada suatu pekerjaan. Partisipasi dari masyarakat ini begitu semangat karena biasanya sebelum diadakan suatu kegiatan kepala desa memberikan penyuluhan lebih awal mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan melibatkan peran serta dari masyarakat dalam bentuk tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan, swadaya gotong royong dari masyarakat melalui pengadaan barang atau material bahan lokal ” (Selasa, 11 April 2017).

Dari hasil kedua informan di atas dapat diketahui bahwa kepala Desa Watumerak mempunyai sifat sosial yang tergolong tinggi dan dimana mampu memanfaatkan sifat sosialnya kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi kembali dalam meningkatkan proses pelaksanaan pembangunan, dan kembali memberikan dorongan kepada masyarakat tentang pentingnya kerjasama dalam pelaksanaan proses pembangunan.

Berkaitan dengan sosoknya sebagai seorang Kepala Desa dan sekaligus sebagai motivator. Kepala Dusun Bora (Nikolaus Nong Pimpin) mengatakan bahwa, kepala desa merupakan sosok yang memiliki

kepercayaan yang tinggi terhadap perangkat dan masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil pun dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu biasanya kepala desa juga rutin memberikan informasi kepada masyarakat terkait rencana-rencana pembangunan di desa, dan menggerakkan masyarakat agar turut serta memberikan partisipasi demi kesuksesan pembangunan yang ada.

Motivasi yang biasa disampaikan adalah dengan meyakinkan masyarakat tentang manfaat pembangunan, sehingga masyarakat tergerak untuk berpartisipasi. Seperti yang dikatakan kepala Dusun Bora dalam wawancara sebagai berikut:

“kepala desa saat ini biasa memberikan arahan mengenai pentingnya kesadaran kepada masyarakat agar dapat terwujudnya pembangunan yang akan dilaksanakan, yang manfaatnya nanti akan dapat dinikmati oleh warga. Selain itu kepala desa juga biasa memberikan arahan-arahan mengenai pembangunan, sehingga masyarakat yakin bahwa kalau pembangunan ini untuk bersama”(Rabu, 12 April 2017)

2. Peran Pemerintah Desa Sebagai Inovator

Pemerintah dalam pembangunan pasti memiliki peran salah satunya selaku inovator. Sebagai seorang kepala desa tentunya mempunyai peranan sebagai petugas pembangunan di desa dan tentunya memiliki kemampuan atau keahlian tertentu seperti penguasa dalam suatu bidang dan mampu memperkenalkan atau memberikan hal yang baru berupa

gagasan, suatu tindakan atau barang-barang berupa teknologi atau ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

Maka, sebagai seorang kepala desa harus mempunyai pendekatan yang tepat untuk penyebarluasannya agar masyarakat segera mengetahui apa yang seharusnya diterapkan dalam kehidupannya.

Untuk dapat mencapai hal tersebut maka diperlukan kerja sama dengan tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh di masyarakat dan mengajak untuk bekerja sama dalam membangkitkan rasa yakin dan memberi kepercayaan kepada masyarakat agar dapat menerima inovasi baru kepada tokoh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses penyebaran inovasi.

Dari penjelasan diatas peneliti mencoba melakukan wawancara terkait dengan peran pemerintah desa sebagai inovator.

Menurut Nikolaus Nong Pimpin (kepala Dusun Bora) mengatakan bahwa:

“antusias masyarakat disini untuk berpartisipasi sangat luar biasa” (Rabu, 12 April 2017).

Hal yang sama juga di katakan oleh ibu Infoni Lata tokoh masyarakat dusun bora masyarakat bahwa:

“di sini seperti biasa sebelum kegiatan desa di jalankan ada beberapa anggota yang di utus dari desa untuk menjelaskan program kegiatan yang dilaksanakan dengan menerjemahkan yang lebih sederhana supaya kami masyarakat mudah memahami sehingga dapat meningkatkan keinginan kami masyarakat untuk

ikut serta dalam kegiatan pembangunan desa ini.” (Kamis 14 April 2017)

Menurut Servinus Jawa (tokoh pemuda masyarakat) mengatakan bahwa:

“kemampuan kepala desa sebagai inovator kepada masyarakat sudah begitu baik, saya melihat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rabat beton kepala desa biasanya ikut langsung ke lokasi dan memberikan gagasan baru kepada masyarakat mengenai penting adanya kerjasama dalam melaksanakan suatu pekerjaan” (Selasa, 11 April 2017)

Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa adapun peranan pemerintah desa sebagai inovator sudah begitu baik dimana menyediakan beberapa anggota untuk menerjemahkan program pembangunan dengan membahas yang sederhana agar mudah di mengerti oleh masyarakat dan mampu memberikan perubahan baru kepada masyarakat mengenai pentingnya pembangunan desa.

3. Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator

Pembangunan infrastruktur yang ada di suatu desa merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kemandirian suatu bangsa sebagai tujuan pembangunan jangka panjang yang dimana tidak hanya sekedar anggaran, tetapi rencana suatu wilayah menjadi aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam menyusun suatu rencana pembangunan.

Maka selain itu kepala desa selaku kepala wilayah harus memainkan suatu peranan tertentu yang khususnya berkaitan langsung dengan peranannya sebagai dinamisator dalam pembangunan. Peranan kepala desa sebagai seorang dinamisator dapat dilihat dari kemampuannya melalui wawancara dengan beberapa masyarakat.

Untuk mengetahui hasil dari peran pemerintah sebagai dinamisator peneliti melakukan wawancara sebagai berikut:

Menurut bapak Kornelus Klega (kepala Dusun Watupedar) mengatakan bahwa:

”Untuk saat ini langkah yang dijalankan pemerintah desa cukup begitu bagus. Biasanya sebelum diadakan suatu kegiatan pembangunan, dari pihak desa biasanya mengusul beberapa orang dalam bentuk tim untuk berperan aktif serta memberikan bimbingan dan pengarahan secara terbuka kepada masyarakat.”(Kamis, 13 April 2017)

Bapak Theodorus Woda ketua BPD mengatakan bahwa:

“Jika terdapat kendala-kendala yang ada dalam proses pelaksanaan kegiatan. kami sebagai aparat pemerintah desa biasanya menggerakkan kembali partisipasi dari masyarakat untuk turut mengikutsertakan diri dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pos ronda maupun pembersihan jalan. langkah ini kami gunakan untuk mendorong dan memelihara lancarnya pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di desa ”(Rabu, 12 April 2017)

Dari hasil wawancara kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah desa sebagai dinamisator sudah sangat baik. Dilihat dari pemerintah desa yang biasanya memberikan bimbingan dan pengarahan serta menggerakkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi kembali jika terdapat kendala-kendala dalam pembangunan.

B. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT

Keberhasilan satu proses pembangunan tidak dapat di lepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakat, baik sebagai kesatuan system maupun sebagai individu yang merupakan bagian yang sangat integral dan sangat penting dalam proses pembangunan, karena secara prinsip pembangunan di tujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu, tanggung jawab berhasil dan tidaknya suatu pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan rakyat.

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan tidak hanya merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu kegiatan secara bersama yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan Desa Watumerak merupakan sebuah cermin dari pembangunan nasional, karena itu titik pembangunan nasional terletak pada pembangunan kecamatan. Maka jelas bahwa partisipasi masyarakat desa yang menjadi keberhasilannya.

Faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang memungkinkan suatu upaya pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan tidak dapat terlaksana dengan baik. Sesuai dengan hasil penelitian, terdapat tiga faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan yaitu: tingkat ekonomi, pendekatan kepala desa kepada masyarakat, dan pendidikan.

1. Pendidikan

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan adalah karena faktor pendidikan. Jika dihubungkan pendidikan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka kenyataannya menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun yang merupakan swadaya masyarakat.

Dengan adanya pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat maka sudah muncul bentuk partisipasi dari masyarakat yang berupa sumbangan ide atau pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk melancarkan pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkan dengan memberi pengalaman dan pengetahuan yang mengembangkan kegiatan yang di ikutinya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti melakukan beberapa wawancara dengan masyarakat di Desa Waturerak:

Menurut Yohanis Nong Manis (Ketua Toko Pemuda Masyarakat) dalam wawancara mengatakan bahwa:

“masyarakat yang biasa hadir pada saat dilaksanakan pembahasan mengenai pelaksanaan kegiatan kadang lebih sedikit, yaitu hanya orang orang yang mengerti dan mampu bicara” (Kamis 06 April 2017)

Sedangkan dalam wawancara dengan bapak Tarsisius mengatakan bahwa:

“dari sekian banyak masyarakat di desa ini sebagian besar masyarakat ikut berpartisipasi dalam bentuk tenaga, ini karena pendidikan yang ada di Desa Watumerak masih rendah” (Kamis 06 April 2017)

Dari hasil wawancara diatas sangat sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan selama dalam penelitian yaitu dimana partisipasi masyarakat yang lebih dominan adalah dalam bentuk tenaga. Partisipasi tenaga yang dimaksud adalah bagaimana masyarakat ikut terlibat secara langsung atau fisik dalam pelaksanaan pembangunan.

Bentuk partisipasi ini di lihat pada saat ada pembangunan gedung sekolah darurat yang terletak di Dusun Watulagar, di sini dapat di ketahi bahwa partisipasi masyarakat yang ada sangat tinggi. Dalam pelaksanaan tersebut masyarakat sangat bahu membahu membawa perlengkapan kerja, kemudian mengerjakannya secara bersama-sama, sehingga pelaksanaan tersebut cepat diselesaikan hanya dalam waktu satu hari.

Selain itu dalam hasil penelitian di lapangan, masyarakat yang tergolong kurang mampu dalam tingkat pendidikan seluruhnya adalah orang-orang yang berusia di atas tiga puluh tahun dan dulunya sangat sulit untuk menempuh pendidikan yang dimana jika dilihat dari keadaan desa dan sekolah yang ada.

Menurut Kamilus Gleko (Kepala Dusun Watulagar) dalam wawancara mengatakan bahwa:

“orang yang sudah berkeluarga disini ketika dulu bagaimana mau sekolah tinggi-tinggi, tempat sekolahnya saja jauh dan kalau dilihat dulu kampung ini masih hutan rimba bagaimana kami mau pergi sekolah ”(07 April 2017)

Namun rendahnya pendidikan masyarakat dengan masyarakat rendah bukanlah menjadi suatu hal yang membedakan bagaimana masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di Desa Watumerak, melainkan kembali masyarakat memanfaatkan dengan kemampuan yang dimiliki untuk ikut berpartisipasi.

2. Tingkat Ekonomi

Setelah mengetahui bahwa faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka akan dipaparkan juga bagaimana pengaruh tingkat ekonomi terhadap pembangunan, khususnya dalam bentuk bantuan keuangan. Tingkat

ekonomi masyarakat dapat diketahui dari penghasilan yang diperolehnya dalam pekerjaan sehari-harinya.

Secara umum pendapatan warga masyarakat Desa Watumerak khususnya para petani berada pada tingkat sedang, dalam arti tidak berkecukupan akan tetapi sebagian lagi yang hidup sebagai petani musiman. Berdasarkan penghasilan masyarakat yang ada di Desa Watumerak berbeda-beda, maka sangat memungkinkan juga partisipasinya dalam pembangunan berbeda-beda. Selain dari penghasilan/tingkat ekonomi yang berbeda pula, hal ini dapat mengurangi bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam bentuk uang.

Penjelasan di atas merupakan pantauan dari penulis selama melakukan penelitian yang ditegaskan oleh narasumber yang di interview secara langsung. Sesuai dengan wawancara dari bapak Yansenus (tokoh masyarakat Dusun Bora) mengatakan bahwa:

“jika di lihat dari masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk uang ialah kebanyakan dari masyarakat yang berpenghasilan lebih, atau bisa juga dikatakan orang yang berada, Jika ada orang yang berpenghasilan rendah terkadang lebih memilih menyumbangkan partisipasi dalam bentuk tenaga mereka guna melancarkan pelaksanaan pembangunan” (Kamis, 13 April 2017)

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan pengalaman langsung peneliti, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk uang terlihat sedikit dibandingkan partisipasi dalam bentuk

tenaga, ini karena penghasilan warga yang ada di Desa Watumerak tergolong rendah.

Kepala desa biasanya mengadakan kegiatan sosialisasi yaitu dengan melakukan kunjungan kerja ke masing-masing dusun untuk menginformasikan seluruh rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat yang selalu berpartisipasi dalam kegiatan adalah masyarakat yang tergolong sebagai aparat pemerintah desa dan masyarakat yang memiliki kedekatan dengan orang-orang tersebut, dimana sebagian besar dari mereka merupakan masyarakat dengan tingkat pendapatan sedang. Sedangkan masyarakat yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi jarang mencampuri kegiatan pembangunan desa karena kesibukannya pada pekerjaan yang digelutinya.

Dalam wawancara dengan ibu Feliksia (tokoh masyarakat Dusun Watulagar) mengatakan bahwa :

“pembangunan di sini bagaimana ya, kami biasanya ikut saja dengan apa yang sudah di buat oleh pemerintah desa, lagi pula kami sebagai masyarakat sampai sekarang masih kurang paham dengan pembangunan yang sedang berlangsung dan hanya orang-orang itu sajalah yang paham akan itu ”(Sabdu, 08 April 2017)

Dari hasil wawancara diatas sesuai dengan tingkatan partisipasi masyarakat menurut Arenstein yaitu pada tingkat takonisme di mana terdiri dari peredaman kemarahan dan konsultasi/partisipasi semu.

Partisipasi semu adalah: partisipasi yang digunakan oleh orang luar atau kelompok elit untuk maksud dan tujuan sendiri dan sementara masyarakat hanya dijadikan sebagai obyek.

3. Pendekatan Kepala Desa Kepada Masyarakat

Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku manusia untuk mengendalikan orang-orang dalam organisasi agar perilaku mereka sesuai dengan perilaku yang di inginkan oleh pemimpin, Hasibuan (2000:167). Kepemimpinan di dalam kehidupan organisasi memiliki peran strategis. Dimana kepemimpinan strategis adalah suatu proses memberikan arah atau inspirasi yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan visi, misi dan strategi organisasi untuk mencapai tujuan.

Kepemimpinan seorang kepala desa di butuhkan untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani berbagai masalah yang terjadi di daerah, sekaligus memecahkan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya mencakup bagaimana kepala desa dapat mengkoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusannya.

Seorang pemimpin juga harus meningkatkan kualitas kepemimpinannya sebagai usaha pengembangan kemampuan memecahkan masalah, melalui proses mengikutsertakan atau meningkatkan peran serta orang-orang yang dipimpin. Seperti yang di kemukakan

Veithsal Rivai dan Deddy Mulyadi (2009:108) bahwa kemampuan mewujudkan dan membina kerjasama pada dasarnya berarti mampu mendorong dan memanfaatkan anggota organisasi secara efektif dan efisien.

Partisipasi juga dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan yang dapat disebutkan sebagai partisipasi dalam memecahkan masalah. Dari kemampuan mewujudkan dan membina partisipasi dalam menyelesaikan suatu masalah akan bermuara pada perkembangan rasa tanggungjawab dalam melaksanakan setiap tugas secara operasional.

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti melakukan wawancara dengan bapak Andreas (tokoh masyarakat dusun watulagar) mengatakan bahwa:

“masyarakat disini sangat antusias untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan karena kebiasaan disini sebelum diadakan kegiatan malamnya biasa ada informasi dari ketua RT” (selasa 11 April 2017)

Selain itu dalam hasil wawancara dengan bapak Amatus Moa kepala kantibmas Desa Watumerak mengatakan bahwa:

”kami juga mempunyai rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama warga masyarakat untuk saling membantu dan sudah terbiasa dengan kerja gotong royong, tapi kadang ada kendala karena warga lain yang sibuk dengan pekerjaanya” (selasa 11 April 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat memperlihatkan bahwa betapa berhasilnya peranan pemerintah sebagai motivator dimana seperti yang dibahas sebelumnya bahwa pemerintah desa dapat membangun kembali hubungan kekeluargaan yang ada, untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Karena masyarakat adalah gabungan dari beberapa individu yang mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda, maka untuk menyatuhkannya diperlukan suatu kekuatan yakni kemampuan pendinamisan oleh pimpinan pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa. Kepemimpinan yang baik dan mampu menyatuh dengan karakter masyarakat yang dipimpin dalam membina dan mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Tetapi akan terjadi sebaliknya jika kepemimpinan yang diterapkan oleh pemerintah bertentangan dengan sifat dan karakter dari masyarakat yang dipimpinnya.

Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat. Berikut wawancara dengan bapak Maksi (tokoh masyarakat Dusun Watupedar) dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“bagi saya kepala desa yang sekarang bagus hubungannya dengan kami sebagai masyarakatnya dalam menyampaikan informasi-informasi yang berhubungan dengan kegiatan yang membutuhkan banyak orang” (Jumad 14 April 2017)

Selain itu menurut Benediktus tokoh pemuda masyarakat mengatakan bahwa:

“selama dalam masa kepemimpinannya beliau juga sangat berperan aktif dalam membangun partisipasi dari masyarakat dengan memberikan arahan berupa penjelasan yang berkaitan dengan kerjasama ” (Kamis 13 April 2017)

Berdasarkan wawancara dapat di simpulkan bahwa keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya dilihat dari partisipasi masyarakat tetapi juga kepemimpinan pemerintah dan aparatnya. Dan berhasilnya masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan juga diperlukan adanya kepemimpinan dari pemerintah desa yang dimana dapat menyatu dengan sikap dan karakter masyarakat setempat, karena dengan kepemimpinan yang baik dan terarah oleh pihak pemerintah maka jelas akan mendorong masyarakat untuk patuh dan taat kepada pemerintah dan kebijaksanaan dalam pembangunan akan dilaksanakan dengan baik tanpa adanya unsur paksaan .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu khususnya uraian pada bab IV yang menyajikan hasil penelitian lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Watumerak sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah dari sebelumnya.
2. Di dalam menjalankan suatu program desa tentu membutuhkan partisipasi dari masyarakat setempat sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar.
3. Adapun peranan pemerintah desa dalam pembangunan meliputi :
peran pemerintah sebagai motivator, inovator dan dinamisator sebagai berikut:

a) Peran pemerintah sebagai motivator

Adanya binaan dari kepala desa terhadap masyarakat agar di bangkitkan kembali sifat kekeluargaan yang telah pudar, guna melancarkan aktifitas dalam suatu pekerjaan.

b) Peran pemerintah sebagai innovator

Dalam melaksanakan suatu kegiatan kepala desa biasa memberikan beberapa gagasan mengenai pentingnya kerjasama dalam suatu pembangunan.

c) Peran pemerintah sebagai dinamisor

Memberikan bimbingan dan pengarahan secara langsung kepada masyarakat dan kembali menggerakkan semangat partisipasi masyarakat jika terdapat kendala dalam pembangunan.

4. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan meliputi, Pendidikan, Tingkat ekonomi dan pendekatan kepala desa kepada masyarakat.

a) Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimiliki warga yang ada di Desa Watumerak masih kurang sehingga bentuk partisipasi masyarakat berupa ide atau gagasan masih kurang.

b) Tingkat ekonomi

Keadaan ekonomi Desa Watumerak ialah sebagian besar penduduk berpenghasilan rendah, yakni sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani musiman.

c) Faktor pendekatan

Pendekatan kepala desa secara langsung kepada masyarakat belum begitu terjalin dengan baik, kepala desa lebih dominan mengadakan pendekatan kepada aparat yang ada.

A. Saran

Adapun saran sarannya adalah sebagai berikut:

1. peranan pemerintah desa dalam pembangunan meliputi : peran pemerintah sebagai motivator, inovator dan dinamisator sebagai berikut:
 - a. Peran kepala desa sebagai motivator dalam meaksanakan suatu kegiatan atau pembangunan harus lebih ditingkatkan lagi karena masih ada kekurangan di dalam mendorong dan melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat.
 - b. partisipasi masyarakat yang ada di Desa Watumerak sekarang harus tetap dipertahankan dan jika perlu ditinggkatkan oleh pemerintah desa.
 - c. Peran kepala desa sebagai dinamisator diharapkan harus lebih berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dan harus memperhatikan kekurangan yang ada agar dapat meningkatkan kembali kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi.
2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan meliputi, Pendidikan, Tingkat ekonomi dan pendekatan kepala desa kepada masyarakat.

- a. Tingkat pendidikan yang ada perlu ditingkatkan agar menambah tingkat partisipasi masyarakat berupa ide/gagasan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
- b. Tingkat ekonomi yang ada harus tetap di pertahankan di pertahankan oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat.
- c. Hubungan kedekatan yang dijalankan oleh kepala desa sekarang perlu ditingkatkan agar partisipasi dari masyarakat pun semakin meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunalan, 2016. *Membangun Sarana Dan Prasarana Desa*. DKI Jakarta, Indonesia
- Kumorotomo Wahyudi, 2013. *Etika Administari Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta , Bandung.
-,2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Supriyatna, 1985. *Otonomi dan Pemberdayaan Desa*. LAPERA, Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Soekarso, Sosro Agus, Putang Iskandar dan Hidayat cecep. *Teori Kepemimpinan*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Siagian P Sondang, 2014 *.Administrasi Pembangunan, Teori,Konsep dan Strateginya*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Thoha Miftah,2000. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Jakarta, Rajawali Grafindo Persada.
- Taliziduhu, 1987.*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*.Yayasan karya dharma. Jakarta.
- Torang Syamsir, 2013.*Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, dan Perubahan Organisasi)*. Alfabeta,cv. Bandung.
- Winardi J. 2001. *Motivasi dan Permotivasion dalam Manajemen*.PT.Raja Gravindo. Jakarta.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, *tentang pemerintah desa*. Permata Pers.

Sumber skripsi

Pranita Susi, 1992. *Peranan Lurah Dalam Menumbuhkan Partisipasi masyarakat Di Kelurahan Ujung Sabang Kecamatan Ujung Kotmadya Daerah Tingkat II Pare-Pare*.Skripsi Universitas Empat Lima. Makassar.

Sumber internet

<http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/>,
Diakses tanggal 13 Desember 2012.

<http://bloggachmad.blogspot.com/2016/06/anlisa-public-policy>





UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 1, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568

<http://www.universitasbosowa.ac.id>, Email: fisip@universitasbosowa.ac.id

Nomor : A.067/FSP/Unibos/III/2017
Lampiran : 1 (satu) Rangkap Proposal Skripsi
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Kepada Yth,

Kesbangpol Kabupaten Sikka

Di

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, maka kami mengharapkan kerjasama dari Bapak/Ibu memberikan Data/Informasi dalam Penelitian Penyusunan Skripsi kepada mahasiswa kami tersebut dibawa ini :

Nama : AMBROSIUS YOLIANTO
Nim : 45 13 021 029
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Judul Penelitian : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Watumerak Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka
Tempat : Kantor Desa Watumerak
Waktu : Maret – April 2017

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 15 Maret 2017
Dekan Fisip Unibos,




Arief Wicaksono, S.Ip, M.A.
Nidn : 0927117602



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JLN.JENDERAL.A.YANI – TELP.(0382)21751 fax.(082)21655
Maumere

SURAT IZIN
KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN SIKKA
NOMOR : 070 / 344 / Kesbangpol / 2017
TENTANG
IZIN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN

DASAR : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
Nomor: A.067/FSP/Unibos/III/2017, Tanggal 15 Maret 2017.

MENGIZINKAN

KEPADA : AMROSIUS YOLIANTO
PEKERJAAN : MAHASISWA
KEBANGSAAN : INDONESIA
ALAMAT : Bora, RT/RW:007/004, Desa/Kel.: Watumerak - Kec.Doreng – Kab.Sikka
UNTUK : Melakukan studi penelitian dengan judul: **"PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN DI DESA WATUMERAK KECAMATAN DORENG
KABUPATEN SIKKA"**
LOKASI : Desa Watumerak Kec.Doreng
LAMANYA : 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal surat ini dikeluarkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kepada yang bersangkutan wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melakukan kegiatan penelitian yang bersangkutan harus melaporkan kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat –istiadat daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil " PENELITIAN " kepada Bupati Sikka Cq.Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Maumere

Pada tanggal : 30 Maret 2017

An. Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Sikka

Sekretaris,

DRS. FEDRIK EDMUNDANTES

PEMBINA TINGKAT I

NIP.19660209 199312 1 001

Tembusan:

1. Bupati Sikka di Maumere (sebagai Laporan);
2. Camat Doreng di tempat;
3. Kepala Desa Watumerak di tempat;
4. Dekan FISIP Universitas Bosowa di Makassar;
5. Yang bersangkutan di tempat



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN DORENG
DESA WATUMERAK
Jln : .- No : .- Kode Pos 86171
B O R A

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : DWM. 070/65/IV/2017

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : YOZH ANDREAS WODA
Jabatan : Kepala Desa Watumerak

Dengan ini menyatakan bahwa :

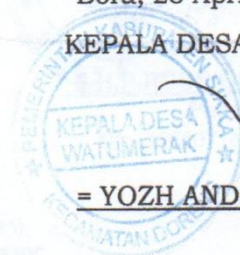
Nama : **AMBROSIUS YOLIANTO**
Tempat Tanggal Lahir : Bora, 07 Desember 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Mahasiswa pada : Universitas Bosowa Makassar
Fakultas : Sosial Politik
Program Studi : S1 Administrasi Negara
NIM : 4513021039
Melakukan penelitian
Dengan judul : "Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan di Desa Watumerak,
Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka".
Mulai tanggal : 05 April 2017
Selesai tanggal : 19 April 2017

Selama penelitian tidak menyimpang dari izin penelitian yang diberikan serta menunjukkan sikap perilaku yang sopan dan membangun komunikasi yang harmonis dengan semua pihak terkait.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sesuai keperluannya.

Bora, 25 April 2017

KEPALA DESA WATUMERAK, *f*



[Signature]
= YOZH ANDREAS WODA =



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JLN. JENDERAL A. YANI - TELP. (0382) 21751 FAX. (0382) 21655
Maumere 86111

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 073 /471/ KesbangPol /2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. NAMA : **B.H.P.RODRIQUEZ,S.Sos.Msi**
b. NIP : 19640714 198603 1 025
c. JABATAN : KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL PADA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN SIKKA

Dengan ini menerangkan bahwa :

- d. NAMA : AMROSIUS YOLIANTO
e. KEBANGSAAN : INDONESIA
f. PEKERJAAN : MAHASISWI
g. ALAMAT : MAUMERE

Telah selesai melaksanakan tugas penelitian dengan judul Penelitian : **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA WATUMERAK KECAMATAN DORENG KABUPATEN SIKKA"** Sesuai Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Nomor : A.06/FSP/Unibos/III/2017 Tanggal, 15 Maret 2017 dan Surat Izin Melakukan Penelitian dari Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka, Nomor : 070 / 344 / Kesbangpol / 2017, Tanggal 30 Maret 2017 serta Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kepala Desa Watumerak Nomor: DWM.070/65/IV/2017, Tanggal 25 April 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 27 April 2017

An. Kepala Badan Kesbangpol Kab Sikka
Sekretaris,
Up. Kabid. Kewaspadaan Nasional,



B.H.P.RODRIQUEZ,S.Sos.Msi
Pembina

Nip. 19640714 198603 1 025

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Sikka di Maumere (sebagai laporan);
2. Dekan FISIP Universitas Bosowa di Makasar;
3. Yang bersangkutan di Tempat;



Hasil Rabat Dusun Bora



Kantor Desa Watumerak



Wawancara Dengan Bapak Theodorus Woda Tgl. 12 April 2017



Partisipasi Masyarakat Dusun Watulagar



Partisipasi Masyarakat Dusun Watulagar dalam Membangun Sekolah Darurat



Hasil Rabat Dusun Watupedar



Hasil Rabat Dusun Watulagar



Wawancara dengan bapak Yozh Andreas Woda pada

Tgl 07 April 2017

SKETSA PETA DESA WATUMERAK

